



## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG.

**Nuraida**  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[nuraida\\_74@yahoo.co.id](mailto:nuraida_74@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Penelitian Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Penelitian ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menjalankan program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data diperoleh langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan-peraturan, sedangkan pengolahan data dengan menganalisis hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten subang belum efektif sesuai dengan teori pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memahami hak dan kewajibannya serta belum semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sosialisasi yang dilakukan Pendamping kepada Keluarga Penerima Manfaat belum maksimal.

**Kata kunci** : Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

### **Abstract**

*The implementation of the family of hope program (PKH) aims to find out how effective the implementation of the family of hope program (PKH) in cisalak sub-district, subang district. The location that was used as the object of research was the hope family program (PKH) in Cisalak sub-district, Subang Regency. The study didcusses maters relating to the implementation of the family of hope program (PKH) in running programs to improve family welfare. In this study the*



*authors used a qualitative descriptive research methods through observations and interviews, literature studies and documentation. Data collection methods are obtained directly from the informant through interviews directly and documents obtained in the form of regulations, while the processing of data by analyzing the results of interviews and observations. The result showed that the effectiveness of the family hope program (PKH) in the district of Cisalak Subang district was not yet effective according to the theory of program effectiveness measurement according to Sutrisno. This is proven by the fact that there are still families of beneficiaries (KPM) who do not all poor people have received assistance from the hope family program and the socialization provided by the companion to the beneficiary families is not maximal.*

**Keywords:** *Effectiveness of the implementation of the family of hope program (PKH)*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara berkembang serta memiliki banyak penduduk, negara demokrasi ini memiliki visi mensejahterakan masyarakat, namun tidak sedikit permasalahan yang ada di negara ini, salah satunya adalah permasalahan ekonomi yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di negara Indonesia. Kemiskinan masih menjadi permasalahan masyarakat Indonesia yang belum terealisasi dan masih menjadi beban pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, kemiskinan ditandai dengan munculnya masyarakat miskin lemah yang tidak memiliki kemampuan dalam berusaha serta mempunyai akses yang terbatas pada kegiatan sosial ekonomi.

Sebagai negara berkembang, dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah sebagai *policy maker* mengeluarkan berbagai kebijakan berupa Program Bantuan Sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga miskin dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan (PKH), Pelaksanaan Program Keluarga Harapan diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak bairi atau ibu hamil). Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu keluarga miskin dan rentan yang diperoleh dari hasil Basis Data Terpadu (BDT) yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu



hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang, untuk jangka pendek dapat membantu pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, dan untuk jangka panjang tentunya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Program ini diberikan tidak permanen, bagi yang sudah merasa mampu diharapkan mengundurkan diri dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini diharapkan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan *Millenium Development Goals (MGDs)* yang sekarang menjadi *Sustainable Developments Goals (SDGs)*.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ada banyak aktor yang berperan salah satunya adalah Pendamping PKH, Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak lain yang terlibat ditingkat Kecamatan maupun dengan program ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, tugas Pendamping yaitu melakukan sosialisasi setiap satu bulan sekali, pengawasan dan mendampingi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program diperlukan pengukuran efektif atau tidaknya suatu program tersebut, untuk melihat sejauh mana sasaran dan tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai. Efektif atau tidaknya suatu program sangat ditentukan oleh adanya faktor dalam pemahaman diri dari pelaksana dan penerima dengan penuh kesadaran dari lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran. Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan diberbagai wilayah di Indonesia salah satunya wilayah Kabupaten Subang. Wilayah kabupaten Subang terbagi menjadi 3 bagian wilayah yaitu, wilayah selatan, wilayah tengah, dan wilayah utara. Wilayah selatan terdiri dari 8 Kecamatan yakni Kecamatan Ciater, Cijambe, Cisalak, Jalancagak, Kasomalang, Segelaherang, Serangpanjang, dan Tanjungsiang. Jumlah penerima PKH di Kabupaten subang bagian selatan sebanyak 10763.

Tabel 1  
Presentase Penerima PKH  
Kabupaten Subang Bagian Selatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Penerima PKH *	Penduduk Miskin**	Presentase
1	Ciater	795	6520	12,19%
2	Cijambe	1628	8492	19,17%



3	Cisalak	2458	8607	28,55%
4	Jalancagak	1998	8838	22,60%
5	Kasomalang	1776	8878	20,00%
6	Sagalaherang	1156	7212	16,02%
7	Serangpanjang	952	6982	13,63%
8	Tanjungsiang	2184	11223	19,46%

Sumber : \* Dinas Sosial Kabupaten Subang, \*\*Badan Pusat Statistik Subang  
Data diolah peneliti (agustus 2019)

Dari tabel 1 dapat dilihat untuk jumlah presentase penerima PKH yang paling tinggi yaitu Kecamatan Cisalak dengan presentase 28,55%. Dalam peninjauan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang masih ditemukan berbagai masalah yang menyebabkan program belum berjalan dengan efektif, masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengetahui atau tidak paham hak dan kewajibannya, KPM berhak mendapatkan bantuan sosial, pendampingan, pelayanan di fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan mendapatkan program bantuan komplementer dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Tetapi masih terdapat KPM yang belum mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

KPM berkewajiban untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 sampai 6 tahun. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas. Tetapi masih terdapat KPM yang belum mengikuti kegiatan di fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kurangnya sosialisasi dari pendamping PKH, seharusnya sosialisasi dilaksanakan setiap satu bulan sekali tetapi masih ada pendamping yang melakukan sosialisasi hanya tiga bulan sekali, Dan dari jumlah 28% yang menerima bantuan PKH masih terdapat 6% yang menerimanya masyarakat yang sudah mampu.

Berdasarkan hasil peninjauan di Kecamatan Cisalak bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum efektif hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut : masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengetahui dan tidak paham hak dan kewajibannya (19% KPM belum memahami hak dan kewajibannya); dan sosialisasi yang belum maksimal dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seharusnya sosialisasi dilaksanakan setiap satu bulan sekali, tetapi masih terdapat pendamping yang melaksanakan sosialisasi hanya tiga bulan sekali.



## Kerangka Teori

### a. Konsep Efektivitas

Kata efektif yang digunakan di Indonesia merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective*. Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas, tujuan atau motif dari pada administrasi dan manajemen ialah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Dengan kata lain ialah pencapaian tujuan dengan hasil yang berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien). Menurut Stress (1985:87) mengemukakan bahwa: "efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu sendiri serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya".

Menurut Gibson (1985:34) : "efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan". Menurut Emerson yang dikutip oleh Handyaningrat (1990:16) menyatakan bahwa "efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Sedangkan handyaningrat (1990:16) memberi penjelasan sebagai berikut ; "bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya maka dikatakan efektif, tetapi jika tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan yang telah ditentukan maka dikatakan tidak efektif".

Menurut pendapat Uber Silalahi (2011:416) dalam bukunya asas-asas manajemen mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : "Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan dan dapat dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan". Efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan maka akan semakin efektif program atau organisasi. Efektivitas berfokus pada hasil program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka jelas bahwa efektivitas adalah ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan atau sasaran-sasaran suatu kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga efektivitas ini berkaitan dengan hasil atau *output* dan *outcome*. Suatu kegiatan atau program dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang telah diharapkan. Efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak,



seperti yang dikemukakan Emerson yang dikutip Handayani (1995:16) sebagai berikut, Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak.

Pendapat di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditunjukkan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Persoalan efektivitas sebenarnya tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja melainkan terdapat kepada seluruh aspek kehidupan manusia dengan berbagai atributnya. Salah satu kriteria dari administrasi sebagai suatu ilmu pengetahuan adalah efektivitas yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan kriteria lainnya, yaitu rasionalitas dan efisiensi. Kriteria ini merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka keberhasilan dari berbagai rangkaian kegiatan manusia dalam sebuah organisasi baik dalam sebuah organisasi baik dari segi pemerintah maupun dalam dunia bisnis. Makmur (2015:6-8) mengemukakan dari segi kriteria efektivitas, unsur-unsurnya antara lain: Ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran

#### **b. Konsep Program**

Penyusunan program mempunyai manfaat besar dalam menentukan masa depan dan kelangsungan suatu organisasi, baik itu suatu negara maupun organisasi pemerintah. Penyusunan program bermanfaat tidak hanya berlaku secara khusus melainkan dapat bermanfaat secara umum yakni dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Manfaat penyusunan program tersebut dapat dirasakan setelah pelaksanaan suatu program dilihat dari hasil yang telah tercapai, karena dengan adanya program yang tersusun maka segala kemungkinan untuk melaksanakan atau mendapatkan hasil diluar harapan yang telah ditetapkan.

Program juga akan menjadi acuan data suatu organisasi untuk melaksanakan kegiatan serta menjadi suatu tujuan yang akan dicapai, selain itu juga program akan menjadi suatu target dari suatu kegiatan. Dengan demikian suatu program merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Penyusunan program maka segala kegiatan yang dilaksanakan dapat terinci sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanaannya sangat sedikit kemungkinan untuk berjalan diluar jangkauan program. Hal ini sangat baik bila dilaksanakan untuk dapat menentukan anggaran biaya yang dibutuhkan, alat-alat yang dikehendaki atau digunakan oleh orang-orang yang akan melaksanakan serta menyangkut waktu dan tempat dari suatu program yang telah disusun atau ditetapkan itu.

Untuk dapat menentukan apa saja yang dibutuhkan, maka diperlukan penggunaan sumber daya, seperti yang dikemukakan Terry dalam Wanardi



(2006:228) sebagai berikut : “Program dapat didefinisikan sebagai sebuah rencana komprehensif yang meliputi penggunaan macam-macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam bentuk sebuah pola yang terintegritas dan yang menetapkan suatu urutan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan serta schedule-schedule waktu untuk masing-masing tindakan tersebut dalam rangka usaha mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.” Selanjutnya Moekijat (2004:442) menyatakan : “Program adalah suatu rencana yang luas yang mengandung penggunaan sumber daya yang berlainan untuk waktu yang akan datang dalam suatu pola yang disatukan dan menentukan suatu uraian kegiatan-kegiatan dan rencana-rencana waktu yang diperlukan masing-masing sumber, guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”. Jadi yang dimaksud dengan program adalah rencana yang luas yang mengandung penggunaan berbagai sumber daya untuk waktu yang akan datang dalam bentuk suatu pola yang akan menentukan suatu urutan kegiatan dengan waktunya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya Tjokroamidjojo (2001:180) menyatakan bahwa suatu program yang dapat dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru pendekatan memang bersifat pembangunan namun seringkali suatu program lebih dikehendaki karena sifat kegiatannya yang antar lembaga. Proram-program juga dipergunakan sebagai alat pemecahan masalah. Sedangkan menurut Azwar (2006:183) menyatakan bahwa : “Penyusunan program (*programming*) adalah suatu upaya menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang juga merupakan ciri perencanaan. Tetapi penyusunan program bukan perencanaan, karena rangkaian kegiatan yang disusun pada penyusunan program dapat dilakukan tidak dari tahap awal.” Dari definisi para ahli diatas, penulis mencoba memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyusunan program adalah suatu rencana yang komprehensif yang isinya mengandung rencana kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, sumber-sumber apa yang harus digunakan dan yang dibutuhkan, oleh siapa akan dilaksanakan, serta kapan rencana akan dilaksanakan dan dimana rencana akan dilaksanakan, semuanya itu diberikan nomor urut kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hal ini dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya McDavid & Hawthorn dalam Janianti (2014:18) mendefinisikan “program sebagai hubungan makna yang dirancang dan diterapkan dengan *purposive*. Suatu program dapat dipahami sbagai kelompok dari aktifitas yang dimaksudkan untuk mencapai satu atau terkait beberapa hasil sasaran”. Farida dalam Janiati (2014:18) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dengan demikia program dapat diartikan serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. Dalam pengertian tersebut ada empat unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu :



- 1) Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama. Bukan asal rancangan tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat.
- 2) Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, dengan kata lain ada keterkaitan antar kegiatan sebelum dengan kegiatan sesudahnya.
- 3) Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non formal bukan kegiatan individual.
- 4) Kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan tanpa adanya kaitannya dengan kegiatan orang lain.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Didalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa didalam setiap program dijelaskan mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, perkiraan anggaran dibutuhkan dan strategi pelaksanaan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. Dengan demikian yang dimaksud dengan penyusunan program adalah usaha dalam menentukan serangkaian kegiatan yang hendak dilaksanakan mencakup sumber-sumber yang akan digunakan, sehingga kegiatan yang direncanakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### c. Ukuran Efektivitas Program

Dari pengertian efektivitas dan program dapat melahirkan efektivitas program, yang mana apabila disimpulkan bahwa efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur (2015:6) berpendapat bahwa "efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang dicapai dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, kebijakan dan hasil yang dicapai". Efektivitas program ditujukan kepada ketepatan penggunaan seluruh sumber daya dalam rangka pelaksanaan suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, begitu pula dengan efektivitas Program Keluarga Harapan. Menurut Budiani (2007:53) efektivitas program dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.
- 3) Tujuan program, yaitu kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang



- dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat.
- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Sedangkan pengukuran efektivitas program menurut Edy Sutrisno (2010:125-126) yaitu sebagai berikut:
    1. Pemahaman Program, yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioprasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.
    2. Tepat Sasaran, yaitu bagaimana program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
    3. Tepat Waktu, yaitu untuk penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif.
    4. Tercapainya Tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum.
    5. Perubahan Nyata, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur melalui sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak sera perubahan nyata bagi masyarakat.
- Dari beberapa pengukuran efektivitas program diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yang berbasis pada informasi atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun prosedur-prosedur pada metode kualitatif yaitu: pengambilan informan secara sengaja, pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar, penyajian informasi dalam bentuk gambar dan tabel, serta interpretasi pribadi atas temuan-temuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran variable yang diteliti. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. Alasan memilih metode penelitian kualitatif penulis ingin memastikan kebenaran datayang ada dilapangan sehingga masalah yang diteliti akan lebih jelas.



## Hasil dan Pembahasan

### a. Gambaran Umum Kecamatan Cisalak dan Program PKH

Cisalak adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Topografi Cisalak adalah berbukit sampai pegunungan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, batas wilayah Kecamatan Cisalak sebelah utara Kecamatan Kasomalang, sebelah barat Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur Kecamatan Tanjung Siang dan sebelah barat Kecamatan Ciater. Wilayah Kecamatan Cisalak terdiri dari 8 Desa. Visi Kecamatan Cisalak adalah Terwujudnya masyarakat Kecamatan Cisalak yang agamis, sehat, berpendidikan dan berkemampuan serta berbasis budaya gotong royong pada tahun 2024 melalui pelayanan yang optimal. Misi Kecamatan Cisalak adalah Mewujudkan masyarakat yang agamis, Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan umum, Mewujudkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan kesehatan, Pendidikan, perekonomian,, dan Mewujudkan pelayanan masyarakat yang optimal.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan. Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dilaksanakan oleh Kementrian Sosial dengan melibatkan berbagai kementrian atau lembaga. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak bair atau ibu hamil). Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu keluarga miskin dan rentan yang diperoleh dari hasil Basis Data Terpadu (BDT) yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang, untuk jangka pendek dapat membantu pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, dan untuk jangka panjang tentunya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Program ini diberikan tidak permanen, bagi yang sudah merasa mampu diharapkan mengundurkan diri dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini diharapkan mampu berkontribusi untuk



mempercepat pencapaian tujuan pembangunan *Millenium Development Goals (MGDs)* yang sekarang menjadi *Sustainable Developments Goals (SDGs)*.

**b. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaen Subang.**

Dalam sub bab ini, penulis akan mendeskripsikan teori pengukuran efektivitas program yang dikembangkan oleh Sutriso (2010:125-126) dengan memperhatikan lima variabel yang menjadi pengukur terhadap keberhasilan suatu program, lima variable tersebut meliputi: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan serta perubahan nyata.

Hasil kajian tentang unsur “pemahaman program” dapat dijelaskan sebagai berikut : Disini akan dilihat apakah dari sisi pemahaman program, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sudah berjalan efektif atau tidak efektif. Program Keluarga Harapan (PKH) dibuat oleh pemerintah, yaitu Direktorat Jendral Jaminan Sosial , Kementrian Sosial RI dan jajaran dibawahnya termasuk Dinas Sosial Kabupaten Subang kemudian disalurkan ke berbagai Kecamatan dan Desa. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami. Pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku atau tanggapan menerminkan sesuatu pemahaman yang termuat dalam suatu komunikasi. Pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi atau masalah-masalah yang ada pada individu atau sekelompok individu. Pemahaman program yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioprasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak efektif. Dalam indikator pemahaman ini terdapat dua sub indikator yaitu pengetahuan atau pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sumber informasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut adalah pendapat dari seksi kesejahtraan sosial Kecamatan Cisalak bahwa: “sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengetahui tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi tidak semua mengerti atau paham akan hak dan kewajibannya sebagai KPM, Masih terdapat KPM yang tidak hadir di fasilitas kesehatan. Seharusnya bagi KPM yang memiliki balita atau memiliki ibu hamil, harus memeriksakan kesehatanya setiap bulan sesuai dengan protokol kesehatan. Padahal pemerintah sudah memberikan biaya gratis bagi KPM di fasilitas kesehatan”. (wawancara 14 November 2019). Dari hasil wawancara dengan Seksi Kesejahtraan Sosial Kecamatan Cisalak diatas, dijelaskan bahwa masih terdapat KPM yang tidak hadir di fasilitas kesehatan dan untuk pemahaman KPM terhadap hak dan kewajibannya belum bisa berjalan dengan baik, padahal KPM sudah menerima haknya tetapi belum bisa menjalankan



kewajibannya. Kemudian berikut adalah hasil wawancara dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Cisalak :“untuk pemahaman KPM terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum begitu memahami, masih kurang kesadaran KPM untuk menjalankan kewajibannya. Seharusnya KPM hadir di fasilitas kesehatan dan di fasilitas pendidikan, tetapi sebagian besar belum menjalankannya, padahal para pendamping selalu mengingatkan untuk menjalankan kewajibannya. Apalagi bagi KPM yang memiliki anak sekolah mereka sudah dikasih keringanan biaya sekolah tetapi kehadiran mereka mengikuti kegiatan belajar kurang dari 85% hari belajar efektif. Dan untuk kehadiran di fasilitas kesehatan juga masih kurang, seharusnya bagi ibu hamil dan bagi KPM yang memiliki balita usia 0 sampai 6 tahun hadir setiap bulan untuk memeriksakan kesehatannya tetapi tidak dijalankan. Dari jumlah penerima PKH 28% Masih terdapat 19% yang tidak memahami dan tidak hadir difasilitas kesehatan dan pendidikan”. (wawancara, 11 November 2019).

Berdasarkan pemaparan diatas yang dikemukakan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dijelaskan bahwa masih kurang kesadaran dari KPM untuk menjalani kewajibannya, (19% KPM belum memahami hak dan kewajibannya), padahal pendamping selalu mengingatkan untuk menjalankan kewajibannya. Pemerintah sudah memberikan haknya kepada KPM yaitu berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Pendampingan, serta pelayanan gratis di fasilitas kesehatan dan pendidikan. Menurut Sutrisno (2010:125-126) pengukur pertama untuk melihat suatu program berjalan efektif atau tidaknya, dilihat dari pemahaman para penerima sasaran program tersebut. Mengacu pada pendapat Sutrisno tersebut maka pemahaman program dapat diartikan untuk melihat sejauhmana pemahaman dari masyarakat penerima sasaran tersebut. Berkenaan dengan hal itu maka pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang belum efektif, hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dari KPM akan paham mereka terhadap hak dan kewajibannya, kurang menjalankan kewajibannya dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari masing-masing KPM. Pemerintah atau Pendamping PKH harus lebih tegas dalam memberikan informasi atau dalam mensosialisasikan terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), agar KPM dapat memahami Program Keluarga Harapan (PKH) dan menjalankan kewajibannya, agar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bisa berjalan dengan efektif.

Kajian terhadap unsur “Tepat sasaran” dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tepat sasaran merupakan hal penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu program. Program dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau tepat sasaran yaitu bagaimana suatu program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran dan sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu keluarga miskin dan rentan yang



diperoleh dari hasil Basis Data Terpadu (BDT) yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Berikut ini merupakan petikan wawancara dengan seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang: “belum semua masyarakat miskin menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan masih ada masyarakat yang sudah mampu menerima bantuan PKH, kami dari pihak pengelola sudah berusaha sudah berusaha agar data yang turun dari pusat bisa tepat sasaran, tetapi data yang keluar masih tetap itu saja”. (wawancara, 14 November 2019). Dari hasil wawancara diatas bahwa masih terjadi ketidaktepatan sasaran untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Berikut dibawah ini merupakan petikan wawancara dengan Pendamping PKH Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang: “untuk ketepatan sasaran belum semua masyarakat miskin menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), baru 28% masyarakat Kecamatan Cisalak yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan, padahal data yang diberikan ke pusat semua masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Cisalak, tetapi data yang turun dari pusat hanya sebagian”. (wawancara, 11 November 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa belum semua masyarakat miskin menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan belum merata ke semua masyarakat miskin baru sebagian. Berikut adalah petikan wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu: “masih terdapat masyarakat yang sudah mampu menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Ada yang punya usaha sendiri dan punya sawah tetapi mendapatkan bantuan sedangkan masyarakat tidak mampu, tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), harusnya yang sudah mampu segera dikeluarkan dari bantuan PKH, dan segera digantikan dengan masyarakat miskin”. (wawancara, 17 November 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), masih ada ketidaktepatan sasaran, masih terdapat masyarakat yang sudah mampu tetapi menerima bantuan PKH, sedangkan masyarakat yang tidak mampu tidak menerima bantuan PKH. Menurut Sutrisno (2010:125-126) untuk mengukur efektivitas program dapat dilihat dari ketepatan sasaran. Sejauhmana sasaran yang telah ditentukan bisa tercapai. Mengacu pada pendapat tersebut maka untuk ketepatan sasaran belum dikatakan efektif, masih terdapat 72% masyarakat miskin yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kajian terhadap unsur “Tepat waktu” dapat dikemukakan sebagai berikut : Tepat yaitu tidak ada selisih waktu sedikitpun, tepat juga berarti tidak kurang dan



tidak lebih. Tepat waktu dalam suatu organisasi atau dalam suatu program yaitu penggunaan waktu dalam pelaksanaan organisasi atau program harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan sebelumnya dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif. Untuk tepat sasaran peneliti melihat dari dua sub indikator, yang pertama Terkait dengan pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentunya bantuan harus diberikan tepat waktu agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan. Yang kedua dan untuk jadwal pendampingan Peningkatan Kemampuan Keluarga harus dilaksanakan setiap satu bulan sekali diharapkan bisa merubah pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar KPM bisa menggunakan bantuan sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah. Berikut adalah petikan hasil wawancara dengan seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang : “kalau untuk pencairan Program Keluarga Harapan (PKH), allhamdulillah dari pusat datangnya tepat waktu yaitu tiap 3 bulan sekali sesuai dengan jadwal pemberian dana PKH, tetapi kalau untuk tanggalnya tidak menentu kadang awal bulan, pertengahan atau akhir bulan. Dan kalau untuk Pendampingan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga masih terdapat pendamping yang melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga hanya 3 bulan sekali pas pencairan dana PKH saja. Kan seharusnya pendamping melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga satu bulan sekali sesuai dengan tugasnya. Karena masih terdapat 3 pendamping yang belum melaksanakan diklat *family development system* atau yang disebut dengan Peningkatan Kemampuan Keluarga”. Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pencairan dana PKH sudah diberikan tepat waktu, tetapi kalau untuk pendampingan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga masih belum efektif, masih terdapat pendamping yang melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga 3 bulan sekali. Berikut merupakan petikan wawancara dengan Pendamping PKH Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang : “untuk pencairan bantuan PKH selalu diberikan tiap 3 bulan sekali, tetapi kalau untuk Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, kami selalu berusaha setiap bulan mengadakan kegiatan tersebut, tetapi belum bisa dijalankan dengan baik karena masih kurangnya kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengikuti kegiatan tersebut serta belum adanya sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Terkadang kami hanya bisa melaksanakan saat pencairan PKH karena KPM hadir semua saat pencairan”. Berdasarkan hasil wawancara diatas untuk melaksanakan peningkatan kemampuan keluarga belum berjalan efektif setiap satu bulan sekali, karena belum adanya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berikut adalah petikan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang : “pencairan uang PKH tepat waktu tiap 3 bulan sekali, cuman kalau untuk tanggal tidak tentu, kadang saya sudah berharap awal bulan pencairan uang PKH, untuk beli keperluan sekolah anak saya, tetapi tidak ada juga, jadi uang bantuan PKH



belum bisa diandalkan untuk kepentingan anak sekolah. Kalau untuk Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga belum berjalan tiap bulan (wawancara, 17 November 2019). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, untuk jadwal pencairan dana PKH belum bisa diandalkan untuk kepentingan anak sekolah karena tanggal pencairan bantuan tidak menentu, dan untuk Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga belum berjalan setiap satu bulan sekali. Mengacu kepada pendapat Sutrisno (2010:125-126) bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilihat dari ketepatan waktu. Untuk ketepatan waktu masih belum dikatakan efektif karena masih terdapat Pendamping yang belum menjalankan pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Keluarga setiap satu bulan sekali, masih terdapat Pendamping yang melaksanakan hanya 3 bulan sekali.

Kajian terhadap unsur "Tercapainya Tujuan" dapat dijelaskan sebagai bahwa Dalam suatu organisasi atau suatu program, tentunya sangat mengharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tercapainya suatu tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Agar tujuannya tercapai diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu ketepatan waktu serta sasaran yang merupakan target kongkrit. Tujuan utama Program Keluarga Harapan yaitu : Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Melalui kemudahan akses dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; dan Menciptakan perubahan dan kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah petikan wawancara dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang : "tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya berjalan efektif, karena kurangnya pemahaman dari para penerima sasaran, masih terdapat KPM yang yang tidak hadir di fasilitas kesehatan dan pendidikan. Serta masih terdapat KPM yang menyalahgunakan uang bantuan tersebut. (wawancara, 11 November 2019) Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum bisa mencapai tujuan karena kurangnya pemahaman dari para penerima sasaran. Dan dibawah ini merupakan petikan wawancara dengan Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang : "tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum tercapai, dari pengelola bantuan sudah berusaha agar tujuan bisa tercapai dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kendala. Sebagian besar KPM belum bisa memenuhi kewajibannya untuk hadir di fasilitas kesehatan dan pendidikan. walaupun ada KPM yang sudah bisa merubah pola pikirnya untuk keluar dari kemiskinan. yang tadinya KPM hanya bisa sekolah sampai SMP sekarang terdapat KPM yang melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tujuan dari Program Keluarga Harapan belum berjalan efektif, karena sebagian besar KPM belum bisa hadir di



fasilitas pendidikan dan kesehatan walaupun ada sebagian KPM yang sudah bisa merubah pola pikirnya untuk keluar dari kemiskinan. Mengacu pada pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno bahwa untuk mengukur suatu Program harus dilihat dari tercapinya tujuan. Dari segi tercapainya tujuan belum sepenuhnya berjalan efektif karena sebagian besar KPM belum bisa mengikuti berbagai kewajibannya.

Kajian terhadap unsur “Perubahan Nyata” dapat dikemukakan bahwa : Perubahan adalah hal yang diharapkan dalam suatu program. Perubahan mengandung makna beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan sesudahnya. Perubahan merupakan hal yang cukup sulit dalam suatu program. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan hasil yang nyata kepada kelompok sasaran. Perubahan nyata yaitu diukur melalui sejauhmana tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mewujudkan perubahan . Pemerintah mengharapkan dari Pelaksanaan program bantuan PKH, dapat terjadi perubahan baik dari segi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah petikan wawancara dengan seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang: “untuk kemiskinan di Kecamatan Cisalak sudah ada perubahan, terutama dari segi pendidikan yang tadinya banyak masyarakat yang hanya sekolah sampai SMP, setelah ada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) banyak yang melanjutkan ke jenjang berikutnya, serta dari segi kesehatan sudah tidak ada masyarakat gizi buruk”. Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sudah ada perubahan dari masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) baik dari segi kesehatan maupun pendidikan. Berikut adalah petikan wawancara dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Cisalak Kabupaten subang yaitu sebagai berikut: “alhamdulillah, di Kecamatan Cisalak untuk tahun 2019 ada perubahan, terdapat beberapa Keluarga Penerima Manfaat yang sudah Graduasi dari Program Keluarga Harapan, tanpa ada paksaan dari pihak pendamping ataupun dari pihak kesejahteraan sosial, tetapi saya sebagai pendamping selalu berusaha memberikan kekuatan agar KPM bisa mandiri. Dan ada sebagian juga KPM yang sudah melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berkat bantuan Program Keluarga Harapan. Serta dari segi kesehatan dan kesejahteraan sosial sudah bisa mengurangi angka gizi buruk”. (wawancara, 11 November 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sudah terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bisa keluar dari kemiskinan dan sudah bisa merubah pola pikirnya untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Mengacu kepada pendapat sutriso bahwa untuk mengukur efektivitas program harus ada perubahan nyata, dan untuk indikator perubahan nyata bisa dikatakan efektif.

## Kesimpulan



Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cislak Kabupaten Subang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pemahaman Program dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cislak Kabupaten Subang masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memahami hak dan kewajibannya hal ini dapat dilihat dari kehadiran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di fasilitas Pendidikan dan fasilitas kesehatan. (19% Keluarga Penerima Manfaat tidak memahami hak dan kewajibannya).
- 2) Tepat sasaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cislak Kabupaten Subang belum berjalan efektif, karena belum semua masyarakat miskin menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), 72% masyarakat miskin belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
- 3) Tepat waktu dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cislak Kabupaten Subang belum berjalan efektif, masih terdapat Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak melaksanakan sosialisasi Peningkatan Kemampuan Keluarga satu bulan sekali.
- 4) Tercapainya tujuan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cislak Kabupaten subang belum berjalan efektif, karena masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memahami hak dan kewajibannya, dan belum semua masyarakat miskin di Kecamatan Cislak Kabupaten Subang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan serta dari segi ketepatan waktu masih terdapat Pendamping yang tidak melaksanakan sosialisasi setiap satu bulan sekali
- 5) Perubahan nyata dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kabupaten Subang bisa dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan , terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## Referensi

- Azwar, S. 1999. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Sigma Alfa.
- Budiani, Ni Wayan. 2009. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol 2, No.1.
- Effendi, tadjuddin Noer. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT.Tiara Wacan Yogya.1993.
- Georgopolous dan Tannaembeu. 1995. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.



- Gibson, J,L, Ivancevich, J,M dan Donelly, J,Jr, 1984. *Organisasi dan Manajemen.perilaku struktur dan proses*. Edisi ke empat. Jakarta : erlangga
- Gibson, james L.1990. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses (jilid II)*, Jakarta. Erlangaa
- Mahmudi. 2010. *Efektivitas Organisasi*. Edisi Kedua. Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung:Refliks Aditama.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya
- Moekijat. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV, Mandar Maju: Bandung.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia
- Pasolong, harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : alfabeta.
- Sedermayayanti. 2006. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja*, Bandung Mandar maju.
- Silalahi, Uber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Reflika Aditama.
- Soewarno, Handyaningrat. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. 1990, hal 15
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfa beta, Bandung.
- Sondang P. Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharno, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta : Ombak Dua.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutrisno, Edy. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang:Intrans Publisng
- Streest Richarrd. M. (1985). *Efektifitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Tjokromidjojo, Bintoro. 2001. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung
- Torang, Syamir. 2014. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- Winardi, 2011. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Divisi Buku Perguruan Tinggi.